Kesiapan Masyarakat Dalam Program Penataan Akses Reforma Agraria di Desa Krikilan Kecamatan Kalijambe Kabupaten Sragen

e-ISSN: 2622-9714

DOI: https://doi.org/10.31292/jta.v8i3.479

Community Readiness in the Agrarian Reform Access Arrangement Program in Krikilan Village Kalijambe District Sragen Regency

Bahar Trianindha Putri, 1* M. Nazir Salim, 1 Dwi Wulan Pujiriyani 1

Mahasiswa Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional, Yogyakarta
 Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional, Yogyakarta
 *Corresponding author: trianindaputri2003@gmail.com

Submitted: June 22, 2025 | Accepted: July 20, 2025 | Published: September 2, 2025

Abstract: The implementation of the Agrarian Reform Access Arrangement (PARA) program often faces a variety of responses from the community, ranging from support to rejection. The success of this program depends on the readiness of the community as the main subject in the implementation of the program. The purpose of this research is to analyze the level of community readiness in the implementation of the PARA program in Krikilan Village, Kalijambe District, Sragen Regency. The method used is a mixed-methods approach with the Community Readiness Model, which measures community readiness through five dimensions: community knowledge, leadership, community attitudes, community understanding, and local resources. The results of the study indicate that the leadership dimension has the highest score of 4.2, which is classified as a high level of ownership. Meanwhile, the community knowledge dimension has a score of 3.4, which is classified as a low level of awareness and falls into the lowest score category. The role and support of leaders in implementing the PARA program play an important role in increasing community readiness. The factors hindering community readiness in Krikilan Village include the fact that the community has not fully participated in the series of activities organized. This indicates that the level of community readiness in Krikilan Village has not yet reached its full potential.

Keywords: Agrarian Reform, Access Management, Community Readiness

Abstrak: Implementasi program Penataan Akses Reforma Agraria seringkali dihadapkan pada beragamnya respons masyarakat, mulai dari dukungan hingga penolakan. Keberhasilan program ini bergantung pada kesiapan masyarakat sebagai subjek utama dalam pelaksanaan program. Tujuan penelitian ini untuk menganalisis tingkat kesiapan masyarakat dalam pelaksanaan program PARA di Desa Krikilan, Kecamatan Kalijambe, Kabupaten Sragen. Metode yang digunakan adalah metode campuran dengan pendekatan Community Readiness Model, yang mengukur kesiapan masyarakat melalui lima dimensi yaitu pengetahuan masyarakat, kepemimpinan, sikap masyarakat, pemahaman masyarakat dan sumber daya lokal. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dimensi kepemimpinan memiliki skor tertinggi yaitu sebesar 4,2 yang termasuk pada tingkat rasa kepemilikan yang tinggi. Sementara dimensi pengetahuan masyarakat memiliki skor 3,4 yang termasuk pada tingkat tidak ada kesadaran dan termasuk dalam kategori skor terendah. Peran dan dukungan pemimpin dalam melaksanakan program PARA memiliki peran penting untuk meningkatkan kesiapan masyarakat. Adapun faktor yang menghambat kesiapan masyarakat Desa Krikilan yakni masyarakat belum sepenuhnya terlibat dalam rangkaian kegiatan yang diadakan. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat kesiapan masyarakat Desa Krikilan belum maksimal.

Kata Kunci: Reforma Agraria, Penataan Akses, Kesiapan Masyarakat



Pendahuluan

Reforma Agraria merupakan salah satu Program Strategis Nasional yang diamanatkan oleh Ketetapan MPR Nomor IX/MPR/2001 tentang Pembaruan Agraria dan Pengelolaan Sumber Daya Alam untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat (Utomo, 2021). Pelaksanaan program ini diatur melalui Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2023 tentang Percepatan Pelaksanaan Reforma Agraria yang bertujuan untuk penataan kembali struktur penguasaan, pemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah yang lebih berkeadilan melalui penataan aset (asset reform) dan penataan akses (access reform). Penataan akses dilakukan pasca diberikannya sertifikat tanah atau legalisasi aset (Wardhani, 2021). Pengelolaan sumber daya agraria tidak hanya berhenti pada pemberian kepastian hukum, tetapi juga pada peningkatan kapabilitas masyarakat dalam mengelolanya (Sulistyorini, 2018).

Kantor Pertanahan Kabupaten Sragen saat ini mengimplementasikan program Penataan Akses Reforma Agraria (PARA) di Desa Krikilan, Kecamatan Kalijambe. Desa Krikilan memiliki potensi di bidang pertanian dan pariwisata. Desa ini menjadi lokasi dari Situs Manusia Purba Sangiran yang telah ditetapkan oleh *United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization* (UNESCO) pada tahun 1996 sebagai *World Heritage Site*. Penetapan lokasi ini sejalan dengan arah kebijakan Reforma Agraria yang menyasar kawasan strategis, termasuk kawasan cagar budaya dan pariwisata prioritas.

Pelestarian dan pemanfaatan kawasan tersebut erat kaitannya dengan masyarakat. Selain itu, dominasi mata pencaharian masyarakat sebagian besar terdiri atas petani dan buruh tani dengan jumlah keduanya mencapai 2.735 jiwa. Ini berarti lebih dari 60% masyarakat bergantung langsung pada sektor pertanian. Maka dari itu, diperlukan penyamaan persepsi bahwa Program PARA tidak hanya menjamin akses legal terhadap tanah, melainkan juga mengurangi ketimpangan akses ekonomi dengan pembentukan kelembagaan lokal, pendampingan kelompok tani dan fasilitasi akses pasar.

Akan tetapi, implementasi program PARA seringkali dihadapkan pada beragamnya respons masyarakat, mulai dari dukungan hingga penolakan. Beberapa masyarakat menyetujui suatu program pembangunan dikarenakan masyarakat merasa teredukasi dan sangat diuntungkan terkait upaya pemanfaatan potensi desa (Soeprapto & Ariadi, 2022). Sementara yang lain memilih menolak terlibat dalam program pembangunan karena merasa tidak diuntungkan. Hal ini diakibatkan dari kurangnya pengetahuan masyarakat terkait dengan program pembangunan yang ada (Setiawan et al., 2018).

Keberhasilan pelaksanaan program PARA tidak hanya bergantung pada kebijakan dari pemerintah tetapi juga dipengaruhi oleh kesiapan masyarakat. Ketika pendekatan *top-down* tidak diimbangi dengan penguatan kapasitas masyarakat secara *bottom-up,* perancangan program tanpa memperhatikan kesiapan masyarakat maka implementasi program cenderung tidak efektif bahkan berpotensi mengalami kegagalan. Hal ini serupa dengan program PARA yang dilaksanakan di Desa Tahunan di mana program tersebut tidak dapat berjalan dengan baik akibat beberapa faktor diantaranya yaitu tidak maksimalnya peran Kantor Pertanahan

Jepara, keterbatasan anggaran dan waktu, minimnya partisipasi masyarakat, dan sulitnya akses informasi.

Hal yang sama juga terjadi di Kelurahan Sumberarum, Kurniawan et al., (2023) menjelaskan bahwa pelaksanaan PARA di Kalurahan Sumberarum menghadapi beberapa permasalahan, diantaranya yaitu minimnya ketersediaan anggaran dan sumber daya manusia akibat kurangnya minat dalam bidang pertanian. Hal tersebut menunjukkan adanya ketidaksiapan masyarakat setempat dalam pelaksanaan program PARA. Oleh karena itu, menilai tingkat kesiapan masyarakat menjadi langkah awal yang penting untuk memastikan bahwa program benar-benar dapat diterima, dijalankan dan memberikan dampak yang berkelanjutan. Namun, di Desa Pasawahan Kecamatan Banjaranyar Kabupaten Ciamis, program PARA dapat berdampak baik yang dibuktikan dengan adanya peningkatan kesejahteraan rumah tangga petani pada tingkat kepemilikan aset. Sementara akses untuk keberdayaan petani masih belum maksimal dikarenakan kurangnya dukungan dari pemerintah setempat dan lembaga penunjang seperti koperasi dan pasar desa (Komala et al., 2021). Dengan demikian, penelitian kesiapan masyarakat ini menjadi penting karena dapat dijadikan sebagai alat deteksi dini terhadap potensi hambatan yang terjadi dalam pelaksanaan program PARA. Dengan mengetahui kesiapan masyarakat, pemerintah dapat menyusun strategi implementasi program PARA yang lebih tepat sasaran, partisipatif dan berkelanjutan.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tingkat kesiapan masyarakat Desa Krikilan dalam menghadapi pelaksanaan program PARA. Pengukuran kesiapan dilakukan melalui pendekatan *Community Readiness Model* (CRM) melalui beberapa dimensi seperti pengetahuan masyarakat, peran kepemimpinan, sikap masyarakat, pemahaman masyarakat dan sumber daya yang tersedia. Adapun hipotesis yang dirumuskan dalam penelitian ini yaitu bahwa tingkat kesiapan masyarakat Desa Krikilan belum maksimal.

Berbagai studi terdahulu telah memanfaatkan pendekatan CRM dalam konteks program pembangunan. Fadhilah (2021) menemukan bahwa masyarakat Desa Cisarua berada pada tingkat inisiasi dalam program Desa Mandiri, di mana masyarakat mulai terlibat dalam pembangunan. Penelitian Pratowo & Kurniasanti (2023) menunjukkan tingkat kesiapan masyarakat lebih tinggi, yaitu berada pada tingkat konfirmasi dalam program *Culture Heritage City* di Trenggalek. Berbeda dengan itu, Kurniati et al., (2015) menunjukkan bahwa masyarakat Kelurahan Oi Fo'o dalam program industri pertambangan marmer masih berada tingkat persiapan, yang menunjukkan perlunya peran aktif pemimpin dan dukungan masyarakat. Sementara itu, penelitian yang dilakukan oleh Safira et al., (2022) menilai kesiapan masyarakat dan pemerintah desa dalam pembangunan pelabuhan di Kecamatan Pusakanagara, Kabupaten Subang menekankan pentingnya kolaborasi antarpihak dalam mendukung keberlanjutan program pembangunan.

Adapun kajian reforma agraria sejauh ini lebih banyak menyoroti aspek normatif dan struktural, seperti kebijakan, regulasi, kelembagaan atau fokus pada konflik agraria. Penelitian terkait kesiapan masyarakat lokal menggunakan pendekatan CRM dalam program

PARA masih sangat terbatas. Hal ini menjadi signifikan mengingat keberhasilan program PARA sangat bergantung pada partisipasi aktif dan kesiapan sosial masyarakat sebagai penerima manfaat (Firdausi & Mhaikal, 2025).

Dengan demikian, posisi kajian ini menjadi penting sebagai pengisi celah dalam literatur yang masih terbatas tersebut, dengan menerapkan CRM dalam menilai kesiapan masyarakat pada program Penataan Akses Reforma Agraria. Penelitian ini tidak hanya bertujuan untuk mengetahui seberapa siap masyarakat Desa Krikilan untuk berperan menjalankan program PARA, tetapi juga untuk mengidentifikasi dimensi-dimensi yang masih lemah dan memerlukan penguatan.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode campuran yang mengintegrasikan metode kuantitatif dan kualitatif. Desain metode campuran yang digunakan dalam penelitian ini adalah eksplanasi berurutan dengan mengumpulkan data kuantitatif terlebih dahulu, dan dilanjutkan dengan mengumpulkan data kualitatif. Adapun data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan sekunder. Data primer diperoleh melalui penyebaran kuesioner. Sementara data sukender diperoleh dari dokumen pemerintah desa, laporan pelaksanaan reforma agraria dan data sosial ekonomi masyarakat.

1. Populasi dan Sampel

Populasi dalam penelitian ini adalah masyarakat penerima manfaat program Penataan Akses Reforma Agraria di Desa Krikilan sejumlah 300 peserta. Pada pendekatan kuantitatif, penentuan responden dilakukan melalui teknik *simple random sampling*. Teknik *simple random sampling* atau teknik acak sederhana merupakan cara memilih sampel secara acak dari populasi tanpa mempertimbangkan tingkatan. Dari pengambilan sampel acak ini setiap sampel mempunyai peluang sama untuk menjadi representasi yang tidak bias dari suatu populasi (Sugiyono, 2019). Selanjutnya, untuk pengambilan sampel tersebut penelitian ini menggunakan rumus dari Slovin yang dirumuskan sebagai berikut:

$$n = \frac{N}{1 + N(e)^2}$$

$$n = \frac{300}{1 + 300(0,1)^2}$$

$$n = \frac{300}{1 + 3}$$

$$n = 75$$

Keterangan:

n: Jumlah sampel N: Jumlah populasi

e: Nilai kritis yang ditetapkan yaitu sebesar 10%

Sehingga sampel yang digunakan dalam pendekatan kuantitatif berjumlah 75 responden dari 300 orang penerima manfaat PARA. Jumlah ini dirasa telah cukup

2. Teknik Analisis Data

a. Data Kuantitatif

Data kuantitatif dilakukan analisis untuk mengidentifikasi kesiapan yang mengacu pada *Community Readiness Model* yang dilakukan sebagai berikut:

- 1) Penghitungan skor tiap dimensi dengan menjumlahkan hasil dari masing-masing responden kemudian dibagi dengan jumlah responden.
- 2) Skor tiap dimensi kemudian dijumlahkan dan dibagi dengan jumlah dimensi yaitu lima, yang disajikan dalam bentuk rumus di bawah ini.

$$SKM = \frac{SD1 + SD2 + SD3 + SD4 + SD5}{5}$$

Keterangan:

SKM: Skor Kesiapan Masyarakat

SD1: Skor Dimensi Pengetahuan Masyarakat

SD2 : Skor Dimensi Kepemimpinan

SD3: Skor Dimensi Sikap Masyarakat

SD4: Skor Dimensi Pemahaman Masyarakat

SD5 : Skor Dimensi Sumber Daya Lokal

- 3) Menentukan interval setiap tingkat kesiapan masyarakat dengan menghitung selisih skor tertinggi dengan skor terendah di lima dimensi kesiapan.
- 4) Hasil selisih tersebut kemudian dibagi jumlah tingkat kesiapan yaitu sembilan, sehingga diperoleh interval tingkat kesiapan. Adapun rumusnya adalah sebagai berikut.

$$Interval = \frac{Skor\ Tertinggi - Skor\ Terendah}{Jumlah\ Tingkatan}$$

5) Menentukan tingkatan kesiapan masyarakat berdasarkan skor kesiapan yang telah dihitung. Adapun interval kesiapan masyarakat Desa Krikilan dalam program PARA adalah sebagai berikut.

Tabel 1. Penentuan Tingkat Kesiapan Masyarakat

	o .	' '
No.	Tingkat Kesiapan	Interval
1.	Tidak ada kesadaran	3,400 – 3,489
2.	Penyangkalan	3,490 – 3,579
3.	Kesadaran Samar	3,580 – 3,669
4.	Pra perencanaan	3,670 – 3,759
5.	Persiapan	3,760 – 3,849
6.	Inisiasi	3,850 – 3,939

7.	Stabilisasi	3,940 – 4,029
8.	Konfirmasi	4,030 – 4,119
9.	Rasa kepemilikan masyarakat tinggi	4,120 – 4,200

Sumber: Diolah Oleh Peneliti, 2025

b. Data Kualitatif

Teknik analisis data kualitatif yang digunakan adalah sebagai berikut:

- 1) Reduksi data, adalah proses penyederhanaan, pengabstrakan dan transkripsi data kasar dari lapangan dengan memilah maupun meringkas data dalam satuan konsep tertentu.
- 2) Penyajian data, adalah sekumpulan informasi yang telah disusun dalam bentuk tertentu untuk mempermudah pemahaman atas fenomena yang terjadi. Bentuk penyajian data ini berupa tabel dan teks naratif yang disusun secara logis dan sistematis.
- 3) Penarikan kesimpulan, adalah tahapan terakhir dimana seluruh data dan kejelasan hasil penelitian ditarik menjadi suatu kesimpulan dari keseluruhan proses analisis data.

3. Variabel

Variabel yang digunakan dalam analisis kesiapan masyarakat dalam program PARA meliputi pengetahuan masyarakat, kepemimpinan, sikap masyarakat, pemahaman masyarakat dan sumber daya lokal. Penentuan pengukuran tingkat kesiapan masyarakat menggunakan skala pengukuran 1-5. Di bawah ini merupakan variabel dan indikator yang digunakan pada penelitian ini.

Tabel 2. Variabel Penelitian

	raber 2. Variaber Perferitian				
No.	Dimensi	Indikator	Penilaian		
		Pengetahuan masyarakat terkait	1-5		
		konsep dan tujuan program Penataan	Sangat tidak paham –		
	Pengetahuan	Akses Reforma Agraria	Sangat paham		
1.	Masyarakat	Pengetahuan masyarakat terkait	1-5		
	iviasyarakat	upaya-upaya yang dilakukan dalam	Sangat tidak paham –		
		pelaksanaan program Penataan Akses	Sangat paham		
		Reforma Agraria			
		Peran dan keterlibatan pemimpin	1 – 5		
		dalam pelaksanaan program Penataan	Sangat tidak berperan –		
		Akses Reforma Agraria	Sangat berperan		
2.	Kepemimpinan		1 – 5		
		Dukungan pemimpin terhadap program	Sangat tidak		
		Penataan Akses Reforma Agraria	mendukung – Sangat		
			mendukung		
		Keterlibatan masyarakat dalam	1 – 5		
		pelaksanaan program Penataan Akses	Sangat tidak terlibat –		
	Sikap	Reforma Agraria	Sangat terlibat		
3.	Masyarakat	Hambatan yang dialami masyarakat	1 – 5		
	Wasyarakat	dalam pelaksanaan program Penataan Akses Reforma Agraria	Banyak hambatan –		
			Tidak ada hambatan		
		,	serius		

		Pemahaman masyarakat mengenai	1-5
		masalah kesejahteraan dan	Sangat tidak paham –
		pemberdayaan tanah masyarakat	Sangat paham
	Pemahaman	Katarsadiaan informasi tarkait nyagram	1 – 5
4.		Ketersediaan informasi terkait program	Sangat tidak tersedia –
	Masyarakat	Penataan Akses Reforma Agraria	Sangat tersedia
		Kemudahan akses informasi terkait	1-5
		program Penataan Akses Reforma	Sangat sulit – Sangat
		Agraria	mudah
		Ketersediaan sumber daya lokal	1-5
		(tenaga ahli, waktu, ruang dan alokasi	Sangat tidak tersedia –
5.	Sumber Daya	dana) yang mendukung pelaksanaan	Sangat tersedia
	Lokal	program Penataan Akses Reforma	3
		Agraria	
		0	

Sumber: Diolah Oleh Peneliti, 2025

Pemilihan metode ini disesuaikan dengan kebutuhan dan tujuan penelitian yaitu untuk mengidentifikasi tingkat kesiapan masyarakat berdasarkan lima dimensi kesiapan yang mengacu pada Community Readiness Model serta untuk memberikan gambaran komprehensif mengenai kondisi sosial masyarakat dalam implementasi program PARA

Hasil dan Pembahasan

Dimensi Dalam Penilaian Kesiapan Masyarakat

1. **Dimensi Pengetahuan Masyarakat**

Dimensi pengetahuan masyarakat digunakan untuk mengukur pengetahuan masyarakat mengenai program PARA. Merujuk pada pendapat Oetting et al., (2014), dimensi pengetahuan ini diukur dari sejauh mana masyarakat mengetahui informasi mengenai tujuan, manfaat dan upaya yang perlu dilakukan dalam implementasi program. Penghitungan persentase indikator setiap dimensi kesiapan dilakukan dengan membandingkan total skor responden pada satu indikator terhadap total keseluruhan skor indikator dalam dimensi tersebut. Gambar 1. menunjukkan hasil bahwa pengetahuan masyarakat terkait konsep dan tujuan maupun terkait upaya pelaksanaan program PARA memiliki nilai yang hampir sama dalam merealisasikan tingkat kesiapan masyarakat.



Gambar 1. Persentase Indikator Dimensi Pengetahuan Masyarakat Sumber: Diolah Oleh Peneliti, 2025

Berdasarkan gambar 1. pengetahuan terkait upaya pelaksanaan program PARA memiliki persentase 49%, sedangkan pengetahuan terkait upaya pelaksanaan program PARA memiliki persentase 51%. Selanjutnya, penilaian skor setiap dimensi kesiapan dilakukan dengan menjumlahkan hasil dari masing-masing responden kemudian dibagi dengan jumlah responden. Berdasarkan Tabel 3, skor dimensi pengetahuan masyarakat adalah 3,4 atau berada pada tingkatan tidak ada kesadaran. Pada tingkat ini, masyarakat belum mengetahui program PARA yang dilaksanakan secara detail. Dalam hal ini, masyarakat hanya mengetahui adanya program tersebut namun belum menyadari tujuan dan manfaat dari program itu sendiri.

Tabel 3. Skor Dimensi Pengetahuan Masyarakat

	3			
No	Indikator Dimensi	Total Nilai Responden	Rata-	Skor
INO	indikator dimensi		rata	Dimensi
1.	Pengetahuan masyarakat terkait konsep	259	3,5	
	dan tujuan program PARA		,	
2.	Pengetahuan masyarakat terkait upaya yang dilakukan dalam pelaksanaan	250	3,3	3,4
	program PARA	230	3,3	

Sumber: Diolah Oleh Peneliti, 2025

Ketidaktahuan masyarakat mengenai tujuan dan manfaat program tersebut seringkali menimbulkan penolakan dari sebagian masyarakat untuk terlibat di dalamnya. Hal ini sejalan dengan pendapat Soeprapto & Ariadi (2022) yang menyatakan bahwa masyarakat yang teredukasi dan memahami manfaat program cenderung memberikan dukungan aktif terhadap pelaksanaan pembangunan. Sebaliknya, Setiawan et al., (2018) menjelaskan bahwa ketidakterlibatan atau penolakan sering muncul dari masyarakat yang merasa tidak diuntungkan, yang umumnya disebabkan oleh kurangnya pengetahuan terkait tujuan dan manfaat program. Rendahnya pengetahuan ini mengakibatkan masyarakat kesulitan dalam menilai kaitan program dengan kebutuhan mereka, sehingga program dianggap tidak penting. Akibatnya, partisipasi masyarakat menjadi rendah dan pelaksanaan program tidak berjalan optimal.

Apabila dilihat dari nilai setiap indikator yang dihasilkan, diketahui bahwa indikator pengetahuan masyarakat terkait konsep dan tujuan program PARA memperoleh nilai ratarata di atas skor dimensi yang menunjukkan bahwa secara umum masyarakat Desa Krikilan mengetahui adanya program PARA. Namun, pada indikator pengetahuan masyarakat terkait upaya untuk pelaksanaan program PARA memiliki nilai rata-rata di bawah skor dimensi yang berarti sebagian besar masyarakat belum mengetahui upaya-upaya yang dilakukan dalam pelaksanaan program PARA.

Ketidaktahuan masyarakat tersebut dapat menghambat terbentuknya sikap positif dan partisipasi aktif dari masyarakat. Hal ini sesuai dengan teori perubahan perilaku yang dikemukakan oleh Notoatmodjo (2010) dalam Nasrullah & Suwandi (2014), yang menyatakan bahwa perubahan perilaku berawal dari pengetahuan. Pengetahuan ini berperan sebagai dasar terbentuknya sikap yaitu penilaian atau respon terhadap suatu objek, dalam hal ini

adalah program PARA. Apabila pengetahuan masyarakat terbatas hanya mengetahui program tanpa menyadari upaya-upaya yang perlu dilakukan, maka sikap positif terhadap program tidak akan tercipta. Akibatnya, masyarakat tidak akan terdorong untuk berpartisipasi aktif yang kemudian menghambat efektivitas dan keberlanjutan program PARA.

2. Dimensi Kepemimpinan

Dimensi kepemimpinan digunakan untuk mengukur sejauh mana peran kepemimpinan dalam mendorong pelaksanaan program PARA. Merujuk pada pendapat Oetting et al., (2014), dimensi kepemimpinan ini diukur dari keterlibatan, pengaruh serta kapasitas pemimpin di masyarakat. Dalam konteks ini yaitu peran, keterlibatan serta dukungan pemimpin terhadap program PARA. Pemimpin diharapkan dapat membantu masyarakat dalam memecahkan masalah serta mendorong masyarakat untuk dapat mendukung setiap kegiatan atau kebijakan yang ada. Gambar 2 menunjukkan bahwa peranan, keterlibatan dan dukungan pemimpin terhadap pelaksanaan program PARA memiliki nilai yang tidak jauh berbeda dalam merealisasikan tingkat kesiapan masyarakat.



Gambar 2. Persentase Indikator Dimensi Kepemimpinan Sumber: Diolah oleh Peneliti, 2025

Berdasarkan gambar 2. peran dan keterlibatan pemimpin memiliki persentase 48%, sedangkan dukungan pemimpin memiliki persentase 52%. Selanjutnya, berdasarkan Tabel 4, skor dimensi kepemimpinan adalah 4,2 atau berada pada tingkat rasa kepemilikan yang tinggi. Pada tingkat ini, adanya peran aktif dari pemimpin baik Kantor Pertanahan Kabupaten Sragen maupun Pemerintah Desa Krikilan yang juga mendukung setiap kegiatan yang dilaksanakan. Adapun hasil wawancara dengan masyarakat penerima manfaat yang menyebutkan bahwa:

"Terlebih kami sebagai pengrajin lokal di Sangiran butuh ide-ide baru, mungkin masukan dari beliau-beliau. Tetapi untuk hasil signifikan kembali lagi ke diri masing-masing" (P, Masyarakat Penerima Manfaat Program PARA wawancara pada tanggal 10 Maret 2025).

Hal ini menunjukkan pemerintah desa yang terus berupaya memfasilitasi setiap rangkaian kegiatan dari program PARA yang akan dilaksanakan seperti penyuluhan dan pelatihan untuk masyarakat. Begitu juga dengan Kantor Pertanahan Kabupaten Sragen dan

stakeholder lain yang selalu memberikan ide dan masukan kepada masyarakat terutama dalam pengembangan usaha yang mereka miliki.

Tahal /I	Skor	Dimanci	Kanan	nimpinan
Tabel 4.	JIOI	Dillicitat	KCPCII	minpinan

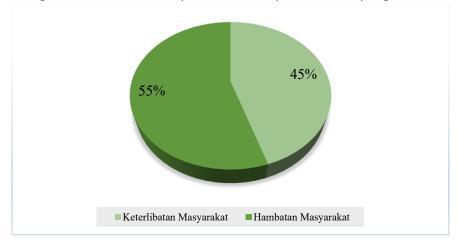
No	Indikator Dimensi	Total Nilai Responden	Rata-rata	Skor Dimensi
1.	Peran dan keterlibatan pemimpin dalam program PARA	306	4,1	4,2
2.	Dukungan pemimpin terhadap program PARA	325	4,3	4,2

Sumber: Diolah Oleh Peneliti, 2025

Apabila peran dan dukungan yang diberikan pemimpin dalam program PARA baik, maka akan berdampak positif terhadap keberhasilan program. Hal ini sejalan dengan pernyataan yang dikemukakan oleh Pilaili et al. (2022), bahwa kepemimpinan merupakan faktor terpenting untuk menunjang keberhasilan pembangunan karena kepemimpinan dapat mempengaruhi masyarakat untuk bekerjasama dalam mencapai visi dan misi pembangunan desa. Selain itu, berdasarkan teori diffusion of innovation oleh Rogers (2003) dalam García-Avilés (2020) menekankan bahwa pemimpin memiliki peran penting dalam menyebarkan ide atau inovasi kepada masyarakat. Hal ini sesuai dengan kebutuhan masyarakat Desa Krikilan.

3. Dimensi Sikap Masyarakat

Dimensi sikap masyarakat digunakan untuk mengetahui sejauh mana partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan program PARA. Merujuk pada pendapat Oetting et al., (2014), dimensi sikap masyarakat ini diukur dari sikap masyarakat terhadap program pembangunan melalui dukungan maupun hambatan. Dalam hal ini yaitu melihat keterlibatan dan hambatan yang dialami masyarakat dalam pelaksanaan program PARA. Berdasarkan Gambar 3, diketahui bahwa tingkat hambatan yang dialami masyarakat memiliki nilai yang lebih tinggi dibandingkan tingkat keterlibatan masyarakat dalam pelaksanaan program PARA.



Gambar 3. Persentase Indikator Dimensi Sikap Masyarakat Sumber: Diolah Oleh Peneliti, 2025

Berdasarkan gambar 3. Keterlibatan masyarakat memiliki persentase 45%, sedangkan hambatan masyarakat memiliki persentase 55%. Selanjutnya, Tabel 5. menunjukkan bahwa

skor dimensi sikap masyarakat adalah 3,8 atau berada pada tingkat persiapan. Pada tingkat ini, masyarakat sudah mengetahui adanya suatu program PARA dan mulai berpartisipasi, tetapi belum sepenuhnya terlibat aktif. Kondisi tersebut menunjukkan adanya celah pemahaman dan ajakan untuk bergerak menjalankan program.

Tabel 5. Skor Dimensi Sikap Masyarakat

	Tabel Stoke Billetis Shap Masyarakat				
No	Indikator Dimensi	Total Nilai	Rata-	Skor	
No	markator Dimensi	Responden rata	rata	Dimensi	
1.	Keterlibatan masyarakat dalam pelaksanaan program PARA	256	3,4	2.0	
2.	Hambatan yang dialami masyarakat dalam pelaksanaan program PARA	313	4,2	3,8	

Sumber: Diolah Oleh Peneliti, 2025

Hal ini relevan dengan konsep partisipasi bertingkat yang dinyatakan oleh Arnstein (2020) dalam teori Ladder of Citizen Participation, dimana partisipasi masyarakat memiliki berbagai tingkatan mulai dari partisipasi simbolik (tokenisme) hingga partisipasi penuh (citizen control). Dalam hal ini, masyarakat Desa Krikilan yang hanya mengetahui dan mulai berpartisipasi tetapi belum aktif, termasuk pada tingkat partisipasi yang rendah hingga sedang, dimana belum cukup kuat untuk menjamin keberhasilan jangka panjang program pembangunan.

Sebagian besar masyarakat yang terlibat aktif adalah masyarakat yang sudah memiliki usaha seperti Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM). Sedangkan masyarakat yang belum memiliki usaha cenderung tidak terlibat aktif dikarenakan meragukan tujuan dari program PARA sehingga masyarakat seringkali tidak menghadiri sosialisasi maupun pelatihan yang diadakan. Meskipun begitu, apabila masyarakat memaksimalkan setiap kegiatan yang diadakan tentu akan memberikan manfaat bagi masyarakat itu sendiri.

"Banyak masyarakat yang bingung dan ragu terhadap program ini, arahnya mau dibawa kemana tujuannya kemana. Padahal dari pelatihan ini kembali ke masing-masing individu dalam memanfaatkannya" (P, Masyarakat Penerima Manfaat Program PARA wawancara pada tanggal 10 Maret 2025).

Kondisi tersebut tidak sepenuhnya menghambat keberhasilan program. Dalam beberapa situasi, keterlibatan awal masyarakat yang belum optimal masih dapat menjadi dasar untuk meningkatkan partisipasi dengan pemberdayaan yang tepat. Oleh sebab itu, meskipun partisipasi masyarakat belum maksimal, keberhasilan program tetap bisa dicapai dengan beberapa upaya yang perlu dilakukan.

4. Dimensi Pemahaman Masyarakat

Dimensi pemahaman masyarakat digunakan untuk mengetahui pemahaman masyarakat mengenai isu-isu terkait kesejahteraan dan pemberdayaan tanah masyarakat. Merujuk pada pendapat Oetting et al., (2014), dimensi pemahaman masyarakat ini diukur dari seberapa jauh masyarakat mengetahui terkait permasalahan, ketersediaan informasi dan kemudahan akses dalam mendapatkan informasi untuk mengetahui isu pembangunan. Dalam konteks ini yaitu pemahaman masyarakat mengenai masalah kesejahteraan dan

pemberdayaan tanah masyarakat, ketersediaan informasi serta kemudahan akses dalam memperoleh informasi terkait isu program PARA. Berdasarkan Gambar 4, diperoleh bahwa tingkat kemudahan akses informasi memiliki nilai paling tinggi antara dua indikator lainnya dan sebaliknya tingkat pemahaman masyarakat mengenai kesejahteraan dan pemberdayaan tanah masyarakat mendapatkan nilai paling rendah.



Gambar 4. Persentase Indikator Dimensi Pemahaman Masyarakat Sumber: Diolah oleh Peneliti, 2025

Berdasarkan gambar 4. Pemahaman mengenai masalah kesejahteraan dan pemberdayaan tanah masyarakat memiliki persentase 29%, sedangkan ketersediaan informasi memiliki persentase 35%, dan kemudahan akses informasi memiliki persentase 36%. Selanjutnya, Tabel 6. menunjukkan bahwa skor dimensi pemahaman masyarakat adalah 4,0 atau berada pada tingkat stabilisasi. Pada tingkat ini, sebagian masyarakat telah memiliki pemahaman terkait masalah kesejahteraan dan pemberdayaan tanah masyarakat yang didukung dengan ketersediaan dan kemudahan akses informasi. Kondisi tersebut dapat menjadi salah satu faktor yang mendorong keberhasilan program pembangunan. Hal ini sejalan dengan teori empowerment dari Zimmerman (1995) dalam Abdi Manaf et al., (2025), yang menyatakan bahwa pemberdayaan individu maupun kelompok sangat tergantung pada kemampuan mereka dalam mengakses informasi, memahami konteks permasalahan dan memiliki kontrol atas keputusan yang diambil. Oleh karena itu, masyarakat yang memanfaatkan akses informasi dengan baik sehingga dapat memahami isu yang ada memiliki potensi besar dalam mendorong keberhasilan serta keberlanjutan program.

Tabel 6. Skor Dimensi Pemahaman Masyarakat

Tabel 6. Skot billensi i emanaman wasyarakat				
No Indikator Dimensi		Total Nilai	Rata-	Skor
	ilidikatoi bililelisi	Responden	rata	Dimensi
1.	Pemahaman masyarakat mengenai masalah kesejahteraan dan pemberdayaan tanah masyarakat	256	3,4	
2.	Ketersediaan informasi terkait program PARA	320	4,3	4,0
3.	Kemudahan akses informasi terkait program PARA	327	4,3	

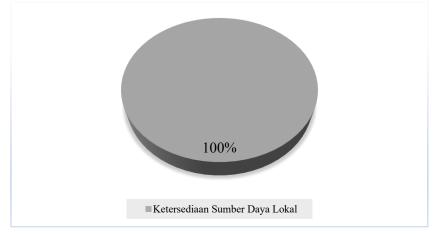
Sumber: Diolah oleh Peneliti, 2025

Dilihat berdasarkan nilai setiap indikator yang dihasilkan, diketahui bahwa indikator ketersediaan dan kemudahan akses informasi memperoleh nilai rata-rata di atas skor dimensi. Hal ini menunjukkan bahwa pemberian informasi terkait program PARA sudah dilakukan dengan baik. Hal ini didukung dengan adanya kemajuan teknologi dimana penyampaian informasi dapat dilakukan menggunakan gadget melalui group chat. Selain itu, Kantor Pertanahan Kabupaten Sragen dan para stakeholder terkait juga sangat membuka pintu apabila terdapat hal-hal yang perlu didiskusikan.

Namun, pada indikator pemahaman masyarakat mengenai masalah kesejahteraan dan pemberdayaan tanah masyarakat memiliki nilai rata-rata di bawah skor dimensi yang berarti sebagian masyarakat belum memahami masalah kesejahteraan dan pemberdayaan tanah masyarakat. Hal ini sejalan dengan kondisi masyarakat yang kurang memanfaatkan potensi dan kesempatan yang ada karena perbedaan pola pikir masyarakat. Sebagian masyarakat cenderung sudah merasa nyaman dengan situasi dan penghasilan yang dimiliki saat ini.

5. Dimensi Sumber Daya Lokal Masyarakat

Dimensi sumber daya lokal masyarakat digunakan untuk mengetahui ketersediaan dan akses masyarakat terhadap sumber daya yang diperlukan dalam mendukung pelaksanaan program PARA. Merujuk pada pendapat Oetting et al., (2014), dimensi sumber daya ini diukur melalui sejauh mana sumber daya lokal yang tersedia untuk mendukung program yang ada. Dalam hal ini yaitu ketersediaan sumber daya lokal seperti tenaga ahli, waktu, ruang dan alokasi dana untuk mendukung pelaksanaan program PARA. Berdasarkan Gambar 29 diketahui bahwa hanya terdapat satu indikator dalam variabel sumber daya lokal yaitu ketersediaan sumber daya lokal yang ada di masyarakat.



Gambar 5. Persentase Indikator Dimensi Sumber Daya Lokal Masyarakat Sumber: Diolah oleh Peneliti, 2025

Berdasarkan gambar 5. Ketersediaan sumber daya lokal memiliki persentase 100%. Selanjutnya, Tabel 7. menunjukkan bahwa skor dimensi sumber daya lokal masyarakat adalah 4,1 atau berada pada tingkat stabilisasi. Pada tingkat ini, sebagian besar sumber daya lokal yang dapat mendukung pelaksanaan program PARA sudah tersedia. Hal ini ditandai dengan

ketersediaan tenaga, waktu, ruang dan alokasi dana yang diberikan dalam rangkaian kegiatan dari program PARA seperti memfasilitasi kegiatan sosialisasi atau penyuluhan di balai desa.

Tabel 7. Skor Dimensi Sumber Daya Lokal

Tabel 71 eker Billieller Baya Lekar				
Nilai Rata-	Skor			
nden rata	Dimensi			
05 4,1	4,1			
_	· 			

Sumber: Diolah oleh Peneliti, 2025

Ketersediaan sumber daya lokal yang memadai tersebut merupakan salah satu komponen penting yang mendukung pelaksanaan program PARA. Berdasarkan teori pembangunan partisipatif yang diungkapkan oleh Chambers (1995) dalam Muhajarah et al., (2023), keberhasilan program pembangunan sangat dipengaruhi oleh pemanfaatan dan penguatan sumber daya lokal yang dimiliki masyarakat. Ketika sumber daya tersebut tersedia dan dapat digunakan dengan baik dalam rangkaian kegiatan suatu program, maka program tersebut akan berjalan lebih efektif. Oleh karena itu, ketersediaan sumber daya lokal yang mendukung secara teknis, fisik dan finansial akan semakin memperkuat pelaksanaan program PARA.

Tingkat Kesiapan Masyarakat

Kesiapan masyarakat Desa Krikilan dalam pelaksanaan program PARA yang dianalisis menggunakan metode Community Readiness Model menunjukkan bahwa skor kesiapan bernilai 3,9 atau berada pada tingkat inisiasi. Nilai tersebut diperoleh dari rata-rata skor yang diberikan responden untuk setiap indikator dalam dimensi kesiapan yang digunakan. Adapun hasil perhitungannya disajikan pada Tabel 8 di bawah ini.

Tabel 8. Skor Kesiapan Masvarakat

No	Dimensi	Rata-Rata Nilai	Skor Dimensi		
1	Pengetahuan Masyarakat	254,5	3,4		
2	Kepemimpinan	315,5	4,2		
3	Sikap Masyarakat	284,5	3,8		
4	Pemahaman Masyarakat	301	4,0		
5	Sumber Daya Lokal	305	4,1		
	Total		19,5		
	Skor Kesiapan 3,9				

Sumber: Olah Data Peneliti, 2025

Pada tingkat inisiasi ini, masyarakat telah cukup memperoleh informasi sehingga memiliki pengetahuan terkait program PARA. Pemimpin juga sudah sangat berperan dalam pelaksanaan program yang kemudian diikuti keterlibatan dari sebagian masyarakat. Selain itu, terdapat sumber daya lokal yang dialokasikan untuk mendukung pelaksanaan program tersebut. Kondisi ini menunjukkan bahwa sebenarnya kesiapan masyarakat belum maksimal dalam pelaksanaan program PARA. Hal tersebut ditandai dengan kurang aktifnya masyarakat dalam mengikuti sosialisasi maupun pendampingan dan pelatihan yang diadakan.

Selain diperoleh skor akhir kesiapan masyarakat, hasil perhitungan juga menunjukkan skor pada masing-masing dimensi. Dimensi kepemimpinan memiliki skor tertinggi yaitu sebesar 4,2 yang termasuk pada tingkat rasa kepemilikan yang tinggi. Artinya peran dan dukungan pemimpin dalam pelaksanaan program PARA berperan sangat penting untuk dapat meningkatkan kesiapan masyarakat. Sementara dimensi yang memiliki skor terendah yaitu dimensi pengetahuan masyarakat sebesar 3,4 yang termasuk pada tingkat tidak ada kesadaran. Artinya, pengetahuan mengenai program PARA yang dimiliki belum dapat meningkatkan kesiapan masyarakat.

Adapun faktor yang mendukung tingkat kesiapan masyarakat Desa Krikilan adalah telah tersedianya pemimpin yang berperan aktif dalam upaya pengembangan Desa Krikilan melalui dukungan maupun pengaruh yang diberikan dalam pelaksanaan program PARA. Faktor lainnya adalah ketersediaan dan kemudahan akses bagi masyarakat dalam memperoleh informasi terkait program PARA, seperti informasi mengenai tujuan, masalah, proses pelaksanaan maupun dampak program PARA yang dilaksanakan melalui sosialisasi atau penyuluhan.

Namun, terdapat pula faktor yang menghambat kesiapan masyarakat Desa Krikilan dalam pelaksanaan program PARA, yaitu masyarakat belum sepenuhnya terlibat dalam rangkaian kegiatan yang diadakan termasuk belum adanya inovasi baru dari masyarakat. Faktor lainnya adalah masyarakat belum secara menyeluruh memiliki pemahaman terkait konsep, tujuan serta pemberdayaan tanah masyarakat yang ada dalam pelaksanaan program PARA.

Kondisi tersebut memperkuat pendapat Arisaputra (2013), bahwa kesiapan masyarakat merupakan bagian dari partisipasi masyarakat untuk mendukung keberlanjutan suatu program pembangunan. Ketidaksiapan masyarakat yang terlihat dari rendahnya keterlibatan aktif, dapat berpengaruh pada kegagalan atau ketidakberlanjutan program di masa mendatang. Hal ini sejalan dengan yang dinyatakan oleh Dewi et al., (2020), kesiapan masyarakat menjadi pilar utama dalam pelaksanaan program, sehingga perlu dilakukan upaya berkelanjutan untuk meningkatkan indikator di setiap dimensi kesiapan masyarakat baik itu tingkat partisipasi maupun pengetahuan masyarakat terhadap program yang dijalankan.

Analisis Hubungan Antar Dimensi Kesiapan

Penelitian ini mengukur lima dimensi yakni pengetahuan masyarakat, kepemimpinan, sikap masyarakat, pemahaman masyarakat, dan sumber daya lokal. Dimensi kepemimpinan tercatat sebagai yang paling tinggi dengan skor 4,2 dan berada pada tingkat "rasa kepemilikan yang tinggi". Kepemimpinan yang kuat dalam konteks Desa Krikilan ditunjukkan oleh keterlibatan aktif kepala desa serta dukungan dari Kantor Pertanahan Kabupaten Sragen dalam menggerakkan dan mendampingi kegiatan-kegiatan program PARA. Namun, meskipun dimensi kepemimpinan berada di atas rata-rata, pengaruhnya belum cukup kuat untuk mengangkat dimensi lainnya secara sepadan. Hal ini terlihat dari rendahnya dimensi pengetahuan masyarakat dengan skor 3,4, yang bahkan berada dalam kategori "tidak ada

kesadaran". Temuan ini menunjukkan adanya pemutusan peran pemimpin sebagai komunikator program dan efektivitas penyampaian pesan kepada masyarakat. Ketidakterhubungan antara dimensi kepemimpinan dan pengetahuan ini mengindikasikan bahwa meskipun informasi telah tersedia, belum ada pendekatan komunikasi yang adaptif terhadap karakteristik sosiokultural masyarakat Krikilan, yang mayoritas berprofesi sebagai petani dan buruh tani.

Sementara itu, dimensi sikap masyarakat yang berada pada tingkat persiapan dengan skor 3,8 mencerminkan kondisi ambigu, yaitus masyarakat sudah mulai terlibat, namun belum memiliki keyakinan kuat terhadap kebermanfaatan program. Sikap ini sangat mungkin dipengaruhi oleh rendahnya pengetahuan dan pemahaman masyarakat terhadap konsep serta tujuan program. Selanjutnya, dimensi pemahaman masyarakat, meski memiliki skor cukup tinggi yakni 4,0, tetap memperlihatkan celah. Indikator pemahaman tentang kesejahteraan dan pemberdayaan tanah masyarakat memperoleh nilai lebih rendah dibandingkan ketersediaan dan akses informasi. Artinya, masyarakat menerima informasi secara permukaan, tanpa memahami implikasinya terhadap kesejahteraan mereka secara konkret.

Di sisi lain, dimensi sumber daya lokal dengan skor 4,1 menunjukkan kesiapan yang relatif kuat dari sisi teknis dan logistik. Ketersediaan ruang, waktu, tenaga dan dana sudah memadai untuk mendukung pelaksanaan program. Namun, kesiapan struktural ini tidak otomatis menjamin kesiapan kultural dan psikologis masyarakat, apabila pengetahuan, sikap, dan pemahaman belum sejalan. Secara keseluruhan, hubungan antar dimensi menunjukkan pola yang tidak linear, di mana kekuatan dalam satu dimensi (seperti kepemimpinan dan sumber daya lokal) belum berhasil mendorong peningkatan signifikan pada dimensi lainnya. Hal ini menunjukkan pentingnya pendekatan interaktif dalam pelaksanaan program.

Kesimpulan

Kesiapan masyarakat Desa Krikilan dalam pelaksanaan program Penataan Akses Reforma Agraria yang diukur melalui lima dimensi kesiapan berada pada tingkat inisiasi atau tingkat ke-6 dari 9 tingkatan yang ada. Dimensi kepemimpinan menjadi faktor dominan dengan skor tertinggi yakni 4,2, hal ini menandakan kuatnya peran pemimpin lokal dan instansi teknis dalam mendorong implementasi program. Namun, dimensi pengetahuan masyarakat justru menempati posisi terendah dengan skor 3,4, yang mengindikasikan rendahnya pemahaman masyarakat terhadap konsep, manfaat, dan tujuan program PARA. Hal ini berdampak langsung pada dimensi sikap, yang meskipun berada pada tingkat persiapan, masih menunjukkan keterlibatan masyarakat yang terbatas. Ketimpangan antardimensi ini mencerminkan bahwa kesiapan struktural (kepemimpinan dan sumber daya lokal) belum diikuti oleh kesiapan kultural (pengetahuan, pemahaman, dan sikap masyarakat) secara menyeluruh.

Berdasarkan hasil tersebut, strategi pelaksanaan program PARA di Desa Krikilan perlu dialihkan dari pendekatan administratif menjadi pendekatan berbasis community

development yang terencana. Peran pemimpin yang telah kuat dapat dimanfaatkan untuk menciptakan ruang belajar bersama di tingkat desa, seperti forum warga atau kelompok tani tematik yang berfokus pada pemanfaatan tanah pasca-sertifikasi. Ketersediaan sumber daya lokal yang sudah memadai seharusnya diarahkan pada program pelatihan berkelanjutan dengan muatan lokal, seperti pelatihan pengelolaan lahan berbasis wisata edukatif Sangiran atau diversifikasi produk pertanian khas. Dengan demikian, peningkatan pengetahuan dan pemahaman masyarakat dapat dilakukan secara kontekstual dan aplikatif. Selanjutnya, keberlanjutan program PARA perlu ditopang oleh model pemberdayaan lintas dimensi, yaitu keterhubungan antara edukasi, pengorganisasian warga, dan dukungan fasilitatif dari pemangku kebijakan agar capaian program tidak stagnan pada tahap inisiasi semata.

Daftar Pustaka

- Abdi Manaf, Ach. H., Kholish, A., & Hidayatullah, M. N. (2025). Penyuluhan dan Pelatihan Diverifikasi Produk Gula Siwalan Cair Pada Kelompok Tani Produsen Gula Siwalan Desa Nyabakan Timur Kecamatan Batang-Batang Kabupaten Sumenep. *ALAMTANA: Jurnal Pengabdian Masyarakat UNW Mataram, 05*(03), 304–309. https://doi.org/10.51673/jaltn.v5i3.2303
- Arisaputra, M. I. (2013). Penerapan Prinsip-Prinsip Good Governance Dalam Penyelenggaraan Reforma Agraria di Indonesia. *Yuridika*, *28*(2), 188–216.
- Arnstein, S. (2020). Building "A Ladder of Citizen Participation." Learning from Arnstein's Ladder: From Citizen Participation to Public Engagement, 2. <a href="https://books.google.co.id/books?hl=id&lr=&id=hnP2DwAAQBAJ&oi=fnd&pg=PT23&dq=Ladder+of+Citizen+Participation&ots=dp9LOxqOM2&sig=OWmsLohheJ6frqvAb-wkiSGi3ec&redir esc=y#v=onepage&q=Ladder%20of%20Citizen%20Participation&f=false
- Dewi, M. R., Syafitri, E. D., & Dewanti, A. N. (2020). Analisis Kesiapan Masyarakat Kecamatan Sepaku dan Samboja Terhadap Rencana Pemindahan Ibu Kota Negara Indonesia. *Jurnal Pembangunan Wilayah dan Kota, 16*(4), 300–313. https://doi.org/10.14710/pwk.v16i4.32368
- Fadhilah, A. M. (2021). Identifikasi Kesiapan Masyarakat Desa Cisarua Kecamatan Sukaraja Kabupaten Sukabumi Menuju Desa Mandiri Tahun 2021. *Jurnal Riset Ilmu Ekonomi Dan Bisnis*, 1(2), 158–165. https://doi.org/10.29313/jrieb.v1i2.515
- Firdausi, I. R., & Mhaikal, M. R. (2025). Kontribusi Partisipasi Masyarakat dalam Meningkatkan Kesejahteraan Petani Melalui Program Reforma Agraria. *Journal of Multidisciplinary Inquiry in Science*, *2*(1), 440–447. https://doi.org/10.32672/mister.v2i1.2470
- García-Avilés, J. A. (2020). Diffusion of Innovation. In M. Louise Mares & E. Scharrer (Eds.), *The International Encyclopedia of Media Psychology* (pp. 1–8). John Wiley & Sons, Inc. https://doi.org/10.1002/9781119011071.iemp0137

- Kurniati, E., Meidiana, C., & Wicaksono, A. D. (2015). Kajian Kesiapan Masyarakat Terkait Rencana Kegiatan Industri Pertambangan Marmer (Studi Kasus di Kelurahan Oi Fo'o, Kota Bima-NTB). *Indonesian Green Technology Journal*, 4(1), 18–27.
- Kurniawan, A. F., Suharto, E., & Andari, D. W. T. (2023). Prospek dan Keterbatasan Acces Reform Berbasis Potensi Wilayah Desa di Kalurahan Sumberarum. *Tunas Agraria*, *6*(3), 204–219. https://doi.org/10.31292/jta.v6i3.245
- Muhajarah, K., Rohmah, S. J., Rosdiana, A., & Nisak, M. (2023). Dakwah Bil Hal: Pemberdayaan Ekonomi Desa Melalui Pengolahan Kopi (Perspektif Chambers). *Journal of Character Education Society*, 6(1), 213–221. https://doi.org/10.31764/jces.v3i1.8490
- Nasrullah, M., & Suwandi, T. (2014). Hubungan Antara Knowledge, Attitude, Practice Safe Behavior Pekerja dalam Upaya untuk Menegakkan Keselamatan dan Kesehatan Kerja. *The Indonesian Journal of Occupational Safety and Health*, *3*(1).
- Oetting, E. R., Plested, B. A., Edwards, R. W., Thurman, P. J., K. Kelly, J., & Beauvais, F. (2014). *Community Readiness for Community Change* (ii). Tri-Ethnic Center for Prevention Research. https://doi.org/10.1515/pubhef-2024-0045
- Pilaili, M., Pusparini, H., & Nurabiah. (2022). Peranan Kepemimpinan Kepala Desa Untuk Meningkatkan Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan Fisik Desa (Studi Kasus pada Pemerintah Desa Bajur, Kecamatan Labuapi, Kabupaten Lombok Barat). *Jurnal Tata SejutaS*, 8(2), 131–148. https://doi.org/https://doi.org/10.32666/tatasejuta.v8i2.322
- Pratowo, R. D., & Kurniasanti, R. P. (2023). Kesiapan Masyarakat terhadap Pengembangan Kecamatan Dongko sebagai Culture Heritage City. *Jurnal Plano Buana*, *4*(1), 1–11. https://doi.org/https://doi.org/10.36456/jpb.v4i1.6919
- Safira, R. L., Prasiwi, R. R. I., Julia, A., & Putra, N. R. (2022). Kesiapan masyarakat dan pemerintah desa dalam pembangunan pelabuhan di Desa Patimban, Kecamatan Pusakanagara, Kabupaten Subang. *Region: Jurnal Pembangunan Wilayah Dan Perencanaan Partisipatif*, 17(2), 296. https://doi.org/10.20961/region.v17i2.59327
- Setiawan, R., Febryano, I. G., & Bintoro, A. (2018). Partisipasi Masyarakat pada Pengembangan Agroforestri dalam Program Kemitraan di KPH Unit XIV Gedong Wani. *Jurnal Sylva Lestari ISSN*, 6(3), 56–63. https://doi.org/https://doi.org/10.23960/jsl3656-63
- Soeprapto, H., & Ariadi, H. (2022). Pemberdayaan Masyarakat dan Pengelolaan Potensi Desa Pesisir Melalui Kegiatan Budidaya Ikan. *Jurnal Pengabdian Mandiri*, 1(8), 1351–1356. http://bajangjournal.com/index.php/JPM
- Sugiyono. (2019). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D (1st ed.). Alfabeta.
- Sulistyorini, G. S. D. (2018). *Pelaksanaan Access Reform Dalam Program Reforma Agraria Pasca Pelaksanaan Redistribusi Tanah Tahun 2011 di Desa Trisobo Kecamatan Boja Kabupaten Kendal* [Universitas Negeri Semarang]. https://lib.unnes.ac.id/38404/

- Utomo, S. (2021). Percepatan Reforma Agraria Untuk Mencapai Keadilan. *Jurnal Hukum Bisnis Bonum Commune*, *4*(2), 202–213.
- Wahyu Wardhani, S. (2021). Penguatan Penataan Akses Reforma Agraria Melalui Sinergitas

 Data dengan Sistem Informasi Akses Reform (Sinar) di Kota Tanjungpinang.

 https://ppsdm.atrbpn.go.id/pluginfile.php/292063/mod_data/content/218120/SuryaWahyu Wardani_LAP.pdf